DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS EKONOMI INDRALAYA

SKRIPSI

KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN



Disusun Oleh : DODDY PRANATA 01013130044

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat

Guna Mencapai Gelar

Sarjana Ekonomi

2007

336.207 07 Pra le 2007

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS EKONOMI INDRALAYA



SKRIPSI

KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN



1593J

Disusun Oleh : DODDY PRANATA 01013130044

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat
Guna Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi
2007

UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS EKONOMI INDERALAYA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA

DODDY PRANATA

NIM

01013130044

JURUSAN

AKUNTANSI

JUDUL SKRIPSI

KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK DAERAH

TERHADAP PENDAPATAN

ASLI I

DAERAH

PROVINSI SUMATERA SELATAN

MATA KULIAH

PERPAJAKAN

PANITIA PEMBIMBING SKRIPSI

Tanggal

Ketua

Drs. Charles Panggabean, Ak

Tanggal

Anggota

Dewi Rina Komarawati, SE, Ak

MOTTO:

Orang – Orang Yang Lemah Menunggu Datangnya Suatu Kesempatan;

Orang – Orang Yang Kuat Menciptakan Kesempatan Itu. "O.S.

MARDEN"

Kupersembahkan Untuk:

- G Allah SWT dan Rasulullah SAW
- C Keluargaku yang tercinta
- C Almamaterku

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim,

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT Pencipta alam semesta beserta isinya, berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini berjudul "Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan" yang merupakan salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari tidak akan terwujud tanpa dukungan dari berbagai pihak, baik dukungan secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Bapak Dr. H. Syamsurijal AK selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya dan seluruh staf yang telah membantu menyelesaikan urusan administrasi akademik.
- Ibu Hj. Rina Tjandrakirana DP, SE, MM, Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi
 Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya dan seluruh stafnya yang telah
 memberikan fasilitas dan bantuan kepada penulis selama studi.
- Bapak Aryanto Dina, SE, Ak selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan kepada penulis.

- Bapak Drs. Charles Panggabean, Ak selaku Ketua Panitia Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan yang berguna dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
- Ibu Dewi Rina Komarawati, SE, Ak selaku Anggota Panitia Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan yang berguna dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
- Bapak Drs. H. Rachmat Djemaah, Ak selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Komprehensif yang telah menguji dan memberikan masukan dan pengarahan yang berguna bagi penulis.
- Ibu Ermadiani, SE, MM, Ak selaku Dosen Penguji Ujian Komprehensif yang telah menguji dan memberikan masukan dan pengarahan yang berguna bagi penulis.
- Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengajar, memberikan ilmu pengetahuan, masukan dan bimbingan selama penulis belajar di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Sriwijaya.
- Keluargaku yang tercinta, Ayah dan Ibu, Abang, Ayuk dan Adik serta keponakanku yang tersayang yang telah banyak memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan penulasn skripsi ini
- 10. Staf Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan atas kerjasama yang diberikan dalam memberikan data dan informasi yang diperlukan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

- 11. Brothers Akuntansi '01 seperjuangan dalam mengarungi ganasnya medan perkuliahan di Indralaya, Yadi' Internisti, Koko Ndut, Anton F4, Andre Redondo, Akmal 14, Pa'e and Bu'e, Ustadz Daus, Komar The Living Legend, Bro Dian, Wahyou Bokep, Yunus, Adhie, Choliel, Imam, M.Hendra.
- 12. Teman-teman seangkatan yang telah 'mendahului', Lia', Riska, Encim, Deny, Anggi, Tarida, Yuyun, Imel, Tia', Retno, Nanda, Meirika, Yessi, Fitriany, Desi, Ade Dar, Titin, Meiliya, Riri, Ade Des, Elvi, Devi, Amrina, Yeyen, Emir, Sri, Viena, Iin, Dwina dll.
- 13. Keluarga besar Akuntansi Universitas Sriwijaya, angkatan '00 : Yulius De'u, Martan, Sepran, Santos, Hill-Man, Jronx-Q, Acil, Dian, Eko, Ova, Ucok, dll. Angkatan '02 : Rimond, Alen, Ma'ul, Ida, Muna, dll. Angkatan '03 : Indah dkk, Rengga, Dedi, Daus, Ajit dll. Angkatan '04 : Ade, Ijal, Helmi, Adon, Samson, Iif, dll.
- 14. Keluarga besar Ekonomi Unsri, Manajemen : Rory, Cek-wan, Yus, Kamplenk, Punk, Anton, Olan, dll. Ekonomi Pembangunan : Andi Gubma FE, SamSoel, Gita, dll
- 15. Komunitas basket Unsri khususnya Fakultas Ekonomi Inderalaya (Anto', Ferdi, Angga, Fani, Oliver, Andi, Diaz, Jon dll). Komunitas basket GOR (Aris "Dunk", Nias, Yudi, Eko, Oz, Jabbar, 'Lebron', Ijal 'Gorilla', 'Bapak Gorilla', Mr. Phillipines, Bambang 'Freestyle', dll).

16. Sahabat karib tempat berbagi suka maupun duka : Rangga CRW, T.J, Andre Cin-De, K,Udyx, Pendi, Joni, Ex '19' (Wahyu Dodo, Nova Cai'bi, Hendra Jin Kura-Kura, Indra Yono, Alvin Syarief, Dicky Dacing, Irham Suneo)

17. Kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian penulisan skripsi ini.

Semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi pembaca, khususnya bagi Mahasiswa Akuntansi. Amin.

Palembang, April 2007

(Doddy Pranata)

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Metode Penelitian	7
1.5.1. Ruang Lingkup Penelitian	7
1.5.2. Sumber Data	7
1.5.3. Metode Pengumpulan Data	8
1.5.4. Metode Analisis	8
1.5.5. Sistematika Pembahasan	9
TAN 2007 : 2 7 MAR 2007	
TAN END : 27 MAR 2001	

BAB	II:	LANDASAN TEORI			
		2.1. Pengertian Pajak	11		
		2.2. Pengelompokkan Pajak	14		
		2.3. Sistem Pemungutan Pajak	15		
		2.4. Pengertian Pendapatan Asli Daerah			
		2.5. Pengertian Pajak Daerah			
		2.6. Tarif Pajak Daerah	20		
		2.7. Jenis Pajak Provinsi	20		
		2.7.1. Pajak Kendaraan Bermotor	20		
		2.7.2. Pajak Kendaraan di Atas Air	26		
		2.7.3. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	28		
		2.7.4. Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air	31		
		2.7.5. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	33		
		2.7.6. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah			
		Tanah dan Air Permukaan	35		
BAB	m:	GAMBARAN UMUM DINAS PENDAPATAN DAER	RAH		
		PROVINSI SUMATERA SELATAN			
		3.1. Sejarah Singkat Berdirinya Dinas Pendapatan Daerah			
		Provinsi Sumatera Selatan	38		
		3.2. Visi dan Misi, Fungsi dan Tugas Pokok Dispenda Provinsi			
		Sumatera Selatan	40		

		3.3. Strukti	ır Organisasi, UraianTugas dan Fungsi dan Keadaan	
		Pegaw	ai Dispenda Provinsi Sumatera Selatan	41
		3.4. Target	dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi	
		Sumat	era Selatan	63
		3.5. Target	dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi	
		Sumat	era Selatan	65
BAB	IV:	KONTRI	BUSI PENERIMAAN PAJAK DAERAH TERHAI)AP
		PENDAP	ATAN ASLI DAERAH PROVINSI SUMATE	ERA
		SELATA	N	
		4.1. Analis	is Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap	
		Penda	oatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan	67
		4.1.1.	Pajak Kendaraan Bermotor	71
		4.1.2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	74
		4.1.3.	Pajak Kendaraan di Atas Air	76
		4.1.4.	Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air	79
		4.1.5.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	81
		4.1.6.	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah	
			Tanah dan Air Permukaan	84
		4.2. Faktor	Yang Dapat Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah	
		Provin	si Sumatera Selatan	87

		4.3. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghambat Dalam Pelaksanaan	
		Pemungutan Pajak Daerah	89
BAB V	v :	KESIMPULAN DAN SARAN	
		5.1. Kesimpulan	90
		5.2. Saran	92
DAETA	D D	USTAKA	
DATIA	K P	USTAKA	

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel		Hal.
III.1	Target Dan Realisasi Penerimaan PAD Provinsi Sumatera Selatan	
	Tahun Anggaran 2002-2005	63
III.2	Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Sumatera	
	Selatan Tahun Anggaran 2002-2005	65
IV.1	Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap PAD	
	Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2002-2005	70
IV.2	Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor	
	Tahun Anggaran 2002-2005	72
IV.3	Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap PAD	
	Tahun Anggaran 2002-2005	73
IV.4	Target Dan Realisasi Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan	
	Bermotor Tahun Anggaran 2002-2005	74
IV.5	Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap PAD	
	Tahun Anggaran 2002-2005	75
IV.6	Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Di Atas Air	
	Tahun Anggaran 2002-2005	77
IV.7	Kontribusi Pajak Kendaraan Di Atas Air Terhadap PAD	
	Tahun Anggaran 2002-2005	78

IV.8	Target Dan Realisasi Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan	
	Di Atas Air Tahun Anggaran 2002-2005	79
IV.9	Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Di Atas Air Terhadap PAD	
	Tahun Anggaran 2002-2005	80
IV.10	Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan	
	Bermotor Tahun Anggaran 2002-2005	81
IV.11	Kontribusi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Terhadap PAD	
	Tahun Anggaran 2002-2005	83
IV.12	Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Pengambilan Dan	
	Pemanfaatan Air Bawah Tanah Dan Air Permukaan	
	Tahun Anggaran 2002-2005	84
IV.13	Kontribusi Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah	
	Dan Air Permukaan Terhadap PAD Tahun Anggaran 2002-2005	86

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan perekonomian suatu negara tidak terlepas kaitannya pada intervensi pemerintahannya masing-masing. Intervensi tersebut diwujudkan melalui peraturan-peraturan dan kebijaksanaan yang diterapkan oleh pemerintah di negara yang bersangkutan. Paling tidak secara ekonomi politik roda perputaran perekonomian suatu negara akan berjalan sesuai dengan arah dan tujuan pembangunan ekonomi yang berlangsung di negara tersebut.

Kegiatan perekonomian di negara Indonesia berlangsung sejalan dengan arah politik dan ekonomi yang diterapkan. Banyak hasil pembangunan yang telah dicapai selama proses pembangunan berlangsung. Program pembangunan tersebut merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional.

Tujuan pembangunan nasional salah satunya adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat serta mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur. Tujuan pembangunan tersebut dapat terlaksana dengan baik apabila pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat, dapat berkoordinasi dengan baik dengan pemerintah yang ada di daerah.

Wewenang pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerahnya sendiri semakin besar setelah dikeluarkannya Ketetapan MPR yaitu Tap MPR Nomor XV /MPR/ 1998 tentang "Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia". Tap MPR tersebut merupakan landasan hukum bagi dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai dasar penyelenggaraan otonomi daerah.

Tujuan utama dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 adalah desentralisasi. Hal ini berarti terjadi pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing. Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya ekonomi yang ada di daerahnya. Pemerintah daerah juga memiliki kewenangan untuk mengatur keuangan daerahnya masing-masing, baik penerimaan maupun pengeluaran daerah.

Pemerintah daerah membuat kebijaksanaan-kebijaksanaan di bidang penerimaan dan pengeluaran daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah sekaligus memberikan pelayanan publik kepada masyarakat di daerahnya masing-masing. Kebijaksanaan di bidang penerimaan daerah ditujukan untuk mengupayakan pencarian sumber dana potensial yang berasal dari daerahnya sendiri selain menerima bantuan dari pemerintah pusat berupa dana pembangunan daerah sebagai penerimaan pelengkap. Kebijaksanaan di bidang pengeluaran daerah

MPR Nomor XV /MPR/ 1998 tentang "Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia". Tap MPR tersebut merupakan landasan hukum bagi dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai dasar penyelenggaraan otonomi daerah.

Tujuan utama dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 adalah desentralisasi. Hal ini berarti terjadi pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing. Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya ekonomi yang ada di daerahnya. Pemerintah daerah juga memiliki kewenangan untuk mengatur keuangan daerahnya masing-masing, baik penerimaan maupun pengeluaran daerah.

Pemerintah daerah membuat kebijaksanaan-kebijaksanaan di bidang penerimaan dan pengeluaran daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah sekaligus memberikan pelayanan publik kepada masyarakat di daerahnya masing-masing. Kebijaksanaan di bidang penerimaan daerah ditujukan untuk mengupayakan pencarian sumber dana potensial yang berasal dari daerahnya sendiri selain menerima bantuan dari pemerintah pusat berupa dana pembangunan daerah sebagai penerimaan pelengkap. Kebijaksanaan di bidang pengeluaran daerah

ditujukan untuk mebiayai belanja rutin dan belanja pembangunan yang telah dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan Undang-Undang UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber-sumber penerimaan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan antara lain:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- b. Dana Perimbangan.
- c. Pinjaman Daerah.
- d. Lain-lain penerimaan yang sah.

Dari ketiga sumber penerimaan daerah tersebut, penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang paling penting. Hal ini disebabkan karena sumber penerimaan ini seluruhnya berasal dari kemampuan daerah itu sendiri, sehingga pemerintah dapat memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan daerah. Pemerintah daerah diharapkan dapat menggali potensi yang ada di daerah secara optimal agar dapat dijadikan sebagai sumbersumber penerimaan daerah sehingga dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan meningkatnya penerimaan yang berasal dari PAD, sumber penerimaan lainnya yang berupa sumbangan maupun pinjaman diusahakan menurun.

Pemberian otonomi kepada suatu daerah termasuk pengembangan wilayah baru juga ditentukan oleh kemampuan daerah tersebut dalam menggali dan

merealisasikan Pendapatan Asli Daerahnya. Adapun unsur-unsur Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Hasil Pajak Daerah.
- b. Hasil Retribusi Daerah.
- c. Hasil Perusahaan Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya yang dipisahkan.
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Sumber pendapatan tersebut merupakan sumber penerimaan yang berasal dari daerah sendiri sehingga sering dijadikan sebagai suatu indikator dalam bidang keuangan di suatu daerah. Sumber penerimaan daerah yang mempunyai peranan penting bagi peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD) adalah berasal dari hasil pajak daerah. Oleh karena mempunyai peranan penting, pajak daerah selalu diupayakan peningkatan realisasi penerimaannya agar dapat mencapai target yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak sering ditemukan beberapa hambatan. Hambatan-hambatan tersebut yaitu berupa kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya, dan kurangnya pengetahuan wajib pajak mengenai prosedur pembayaran pajak, serta kualitas aparat pajak itu sendiri yaitu berupa kemampuan teknis dan nonteknis yang masih perlu ditingkatkan agar dapat menangani masalah-masalah yang terjadi dalam bidang perpajakan. Menurut Mardiasmo (2003:8), hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

Perlawanan pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang disebabkan antara lain:

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Bentuknya antara lain:

- a. Tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- b. Tax evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undangundang (menggelapkan pajak).

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan diatas, maka skripsi ini penulis beri judul "KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN".

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mencoba merumuskan permasalahan yang berhubungan dengan penelitian yang diambil dan menjadi dasar di dalam penelitian ini. Permasalahan-permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1. Apakah kontribusi penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2002 sampai dengan 2005 sudah optimal?
- Faktor-faktor yang dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah di Provinsi Sumatera Selatan?
- 3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pemungutan Pajak Daerah di Provinsi Sumatera Selatan?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan perumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

- Mengetahui apakah kontribusi penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Selatan sudah optimal.
- Mengetahui faktor-faktor yang dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah di Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pemungutan Pajak Daerah di Provinsi Sumatera Selatan.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat bagi penulis

Penelitian ini dapat menambah dan memperluas pengetahuan penulis tentang Pajak Daerah dalam kaitannya dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan.

2. Manfaat bagi kalangan akademisi

Skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan mengenai pajak daerah dan juga sebagai bahan masukan bagi pihak yang berkepentingan khususnya kalangan akademisi untuk penelitian selanjutnya.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Ruang Lingkup Penelitian

Penulis tertarik untuk menulis mengenai kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam hal ini, penulis mengambil objek penelitian pada Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Selatan.

1.5.2. Sumber Data

Data yang digunakan yaitu berupa data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi baik yang dipublikasikan atau yang tidak, yang telah dikumpulkan oleh pihak lain. Data yang diolah dan dianalisis dalam penelitian ini diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera

Selatan. Data tersebut berupa perkembangan komponen Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah dalam periode tahun anggaran 2002 sampai dengan 2005.

1.5.3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan, yaitu:

a. Studi Pustaka

Yaitu melakukan penelitian dengan mempelajari buku-buku literatur dan artikel-artikel yang mendukung objek penelitian.

b. Studi Lapangan

Yaitu melakukan penelitian secara langsung dari objek penelitian dengan metode:

- Wawancara, yaitu dengan tanya jawab dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan objek penelitian.
- Dokumentasi, yaitu dengan melakukan penelitian terhadap data yang berupa dokumen-dokumen yang mendukung permasalahan yang akan dibahas.

1.5.4. Metode Analisis

Dalam menganalisis permasalahan ini, penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif digunakan untuk menjelaskan data pada tabel yang disajikan yaitu kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Selatan dan faktor-faktor yang dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah Provinsi Sumatera Selatan serta faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pemungutan Pajak Daerah di Provinsi Sumatera Selatan.

1.5.5. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini dimaksudkan untuk mempermudah pembaca mengetahui isi dari skiripsi ini secara keseluruhan. Sistematika pembahsan tersebut yaitu:

BABI : PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang dari pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang terdiri dari ruang lingkup penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini membahas pandangan-pandangan secara teoritis mengenai masalah yang diteliti. Pandangan-pandangan secara teoritis tersebut yaitu mengenai pengertian, pengelompokkan serta sistem pemungutan pajak, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Pajak Daerah.

BAB III: GAMBARAN UMUM DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang keadaan umum Dinas Pendapatan Daerah Provinsi sumatera Selatan, yang meliputi sejarah singkat berdirinya organisasi, fungsi dan tugas pokok, struktur organisasi dan uraian tugas (job description) dan keadaan pegawai serta target dan realisasi penerimaan pajak daerah dan PAD provinsi Sumatera Selatan.

BAB IV: KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK DAERAH TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
Dalam bab ini penulis akan membahas permasalahan yang telah
dirumuskan dengan menjelaskan apakah kontribusi penerimaan Pajak
Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Selatan
sudah optimal, faktor-faktor yang dapat meningkatkan penerimaan pajak
daerah, dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam
pemungutan pajak daerah Provinsi Sumatera Selatan.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya. Selain itu penulis memberikan saran yang diharapkan berguna setelah melakukan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Brotodiharjo, R. Santoso, 1993, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Edisi Ketiga, PT. Eresco, Bandung.
- Dispenda Provinsi Sumatera Selatan, 2006, Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tentang Pajak Daerah. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Palembang.
- Mardiasmo, 2003, Perpajakan. Edisi Revisi, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Samudra, Azhari A., 2005, Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak dan Retribusi. PT. Hecca Mitra Utama, Jakarta.
- Suandy, Erly, 2002, Hukum Pajak. Edisi Revisi Kedua, Salemba Empat, Jakarta.
- Sunarto, 2005, Pajak dan Retribusi Daerah. Penerbit Amus dan Citra Pustaka, Yogyakarta.
- Waluyo, Wirawan B. Ilyas, 2000, *Perpajakan Indonesia*. Cetakan Kedua, Salemba Empat, Jakarta.